



Beri Kesempatan bagi Wisatawan

JOGJA—Warga DIY diimbau memberikan kesempatan kepada pelancong untuk menikmati sejumlah tempat wisata selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019. Berbagai persoalan sudah muncul saat masa liburan akhir tahun ini, seperti parkir dan kemacetan.

Sunartono, Lukas Subarkah
 & Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

Wakil Gubernur DIY KGPAA Sri Paduka Paku Alam (PA) X menyarankan penduduk DIY, terutama di Jogja dan sekitarnya, tidak keluar rumah menggunakan mobil. Imbauan tersebut disampaikan demi mengurangi volume kendaraan roda empat yang masuk ke Kota Jogja sekaligus mengurangi kemacetan.

"Pada libur perayaan Natal dan Tahun Baru ini, ada imbauan kepada warga: jika tidak terlalu penting, jika tidak ada urusan mendesak, tidak perlu keluar pakai kendaraan roda empat, berilah

▶ Berbagai persoalan masih menonjol pada libur Natal dan Tahun Baru.

▶ Parkir sembarangan akan menimbulkan kemacetan.

kesempatan kepada tamu kita, para wisatawan, baik dalam dan luar negeri," kata dia di Gedhong Pare Anom, kompleks Kepatihan, Kamis (26/12).

Wakil Gubernur juga mengharapkan juru parkir bisa mengatur parkir lebih baik sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Menurut dia, kemacetan yang terjadi di berbagai titik di Kota Jogja banyak disebabkan parkir sembarangan.

"Tentu parkir tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena jalan-jalan di DIY tidak terlalu lebar, mestinya tidak perlu diperparah lagi dengan parkir sembarangan," ucapnya.

Selain menimbulkan kemacetan, parkir juga menjadi persoalan karena masih terdapat juru parkir yang mematok tarif di luar ketentuan. Salah satu pengguna parkir, Aji Muhawarman, mengungkapkan keluhan itu lewat *Twitter*.

▶ Halaman 10

TEMPAT PARKIR KHUSUS

Berdasarkan Perda Kota Jogja No.20/2009 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus tempat parkir khusus adalah pemberhentian kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang secara khusus dimiliki pemerintah daerah yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah atau orang pribadi atau badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir, dan pelataran atau lingkungan parkir (termasuk parkir di bangunan milik pemerintah daerah).



JENIS KENDARAAN	K I	K II
■ Truk gandengan, sumbu III atau lebih	30.000	20.000
■ Truk Besar	20.000	15.000
■ Bus Besar	20.000	15.000
■ Truk sedang/boks	15.000	10.000
■ Bus sedang	15.000	10.000
■ Sedan, jip, pikap, station wagon/boks, kendaraan Bermotor roda tiga	2.000	1.500
■ Sepeda motor	1.000	1.000
■ Sepeda listrik	500	500
■ Sepeda	300	300

■ K I Tarif Kawasan I dalam rupiah ■ K II Tarif Kawasan II dalam rupiah

Tarif berlaku untuk dua jam pertama parkir, dan setiap jam selebihnya dikenakan 50% dari tarif.

Gratis: Harian Jogja/Tri Harjono

Sumber: peraturan.jogja.go.id

Beri Kesempatan...

Dia mendapat karcis parkir dengan tarif Rp10.000 di selatan Pasar Bringham, tetapi harus membayar Rp35.000.

Di dalam karcis, tarif parkir untuk mobil barang Rp10.000 dan berlaku kelipatan 50% setiap satu jam berikutnya. Aji membawa minibus dan hanya parkir selama 1,5 jam sehingga dia seharusnya hanya membayar Rp15.000.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, menyarankan wisatawan atau pengguna kendaraan yang merasa diperas agar melapor ke polisi. Dia menegaskan tarif parkir yang berlaku masih sesuai Peraturan Daerah No.19/2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Perda No.20/2009 tentang Retribusi Parkir Khusus (lihat grafis). Kota Jogja juga memiliki Perda No.2/2019 tentang Perparkiran yang akan berlaku mulai tahun depan.

Arif mengklaim jukir di bawah jabatannya selalu dibina dan diawasi. Dinas Perhubungan Kota Jogja akan memberikan sanksi bagi jukir yang melanggar ketentuan.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, mengatakan bakal bersikap tegas dengan mencabut izin dan memasukkan jukir nakal dalam daftar hitam.

"Wilayahnya saja di mana, itu nanti yang menjadi tanggung jawab pengelola parkir di situ. Kawasan itulah yang harus menjadi perhatian dan kawasan itu yang akan menjadi pantauan kami nanti," katanya.

Selain parkir yang menimbulkan kemacetan, Wakil Gubernur DIY menyoroti banyak pengusaha atau pedagang kuliner yang seringkali menimbulkan kemacetan dan banyak menggunakan trotoar. Ia mengharap mereka memberi akses bagi pejalan kaki dan tidak menggunakan semua trotoar untuk berjualan.

Bagi pengusaha kuliner, pengusaha souvenir dan sebagainya mestinya tidak menggelar usahanya terlalu meluber ke jalan dan memenuhi trotoar. Trotoar adalah fasilitas untuk

pejalan kaki," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Gubernur juga meminta kepada pemerintah di kabupaten dan kota bekerja sama secara menyeluruh mengatur arus lalu lintas. Koordinasi sangat penting untuk meningkatkan pengembangan peluang usaha sehingga keramaian tidak terpusat di titik tertentu saja.

"Area yang memang disinyalir rawan macet bisa diatasi dan kemungkinan besar ketika arus diatur dengan lebih komprehensif, tentu peluang usaha kecil kuliner dan tempat wisata akan lebih banyak yang tumbuh," katanya.

Kepadatan Luar Jogja

Kepadatan lalu lintas juga terlihat di akses menuju objek wisata di Bantul.

Rekayasa lalu lintas selama libur Natal masih dikeluhkan sejumlah pengelola objek wisata di wilayah Mangunan dan sekitarnya. Pasalnya jalur Mangunan-Patuk masih sempit.

"Lalu lintas sebenarnya lancar. Tetapi ada kebijakan bus besar boleh naik dari Imogiri tapi enggak boleh turun, baliknya lewat Patuk. Akhirnya semrawut karena jalan Mangunan-Patuk sempit untuk berpapasan dengan bus lain, dan membahayakan," kata Bendahara Koperasi Notowono, Toto Prasetyo, Kamis.

Berdasarkan pantauan *Harian Jogja*, jalur yang sudah dilebarkan adalah jalur Imogiri-Mangunan dan Mangunan-Muntuk. Sementara Muntuk sampai Patuk Gunungkidul masih sempit, bahkan kerusakan terlihat di jalan dari objek wisata Lintang Sewu hingga Puncak Becici. Jika ada dua bus yang berpapasan, salah satunya harus mengalah dan keluar badan jalan. Meski demikian, jumlah pengunjung ke sejumlah objek wisata di Mangunan dan sekitarnya itu masih tinggi.

Koperasi Notowono atau wadah pengelola wisata Mangunan dan sekitarnya mencatat selama liburan Natal ini, objek wisata yang mereka kelola dikunjungi tak kurang dari 81.180 orang. Jumlah wisatawan itu terhitung sejak 21-25 Desember lalu di objek

wisata Pinus Pengger, Lintang Sewu, Puncak Becici, Pinus Sari, Pinus Asri, Bukit Panguk, Bukit Mojo, Seribu Batu, dan Pintu Langit, serta tidak termasuk Kebun Buah Mangunan yang dikelola oleh Pemkab Bantul.

Dari jumlah tersebut yang terbanyak adalah Pinus Pengger mencapai 23.341 orang dan Puncak Becici sebanyak 18.029 orang. Tokok mengaku belum bisa membandingkan dengan jumlah kunjungan pada liburan Natal tahun lalu. Namun dari catatannya beberapa objek wisata ada yang menurun dan ada yang meningkat jumlah pengunjungnya.

Tiap operator [pengelola wisata] ada yang naik tapi banyak juga yang turun. Keluhan wisatawan hampir tidak ada. Hanya beberapa agen perjalanan yang mengeluh jalur Mangunan-Patuk semrawut karena adanya kebijakan bus harus lewat Patuk semua," kata Aris.

Sebelumnya Dinas Perhubungan dan Polres Bantul menyebut bus-bus besar boleh naik dari Jalur Imogiri-Mangunan, namun setelah sampai atas bus tidak diperkenankan putar arah, tetapi harus kembali lewat Mangunan. Bus yang datang dari Patuk juga harus kembali melalui Patuk.

Pengelolaan pariwisata agar lebih rapi sangat penting untuk menjaga Jogja sebagai salah satu destinasi utama wisata di Indonesia.

Endang Widayati, pengamat pariwisata STIE Pariwisata API, mengatakan kepadatan lalu lintas akan menimbulkan ketidaknyamanan. Wisatawan bisa kapok berkunjung ke DIY apabila perjalanan menuju objek wisata tidak lancar dan membutuhkan waktu lama.

"Sudah seharusnya pemerintah menata agar wisatawan tetap nyaman, misalnya penataan arus, pemaksimalan jalan alternatif, dan penyediaan angkutan massal."

Perilaku pengelola wisata, termasuk juru parkir, juga harus ramah terhadap wisatawan. Sanksi tegas harus dijatuhkan kepada juru parkir *nuthuk* yang merusak reputasi Jogja. (Jumail)



Harian Jogja/GiGiH M. Hanafi

Puluhan kendaraan terparkir di titik-titik larangan parkir kawasan Alun-Alun Utara, Jogja, Kamis (26/12). Ketiadaan petugas serta pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah mengakibatkan sejumlah ruas jalan dimanfaatkan untuk parkir dengan tarif tidak sesuai perda.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005